

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H., Rangga, B. I., & Amin, D. (2020). Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Agung Haris. (2023) Mengenal Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk Objek Makanan dan/atau Minuman dan Tenaga Listrik [KMS:: Mengenal Pajak Barang dan Jasa Tertentu \(PBJT\) Untuk Objek Makanan dan/atau Minuman dan Tenaga Listrik \(kemenkeu.go.id\)](#) diakses tanggal 7 Juli 2024 pukul 10.01.
- Asmarani, & Chandra, N. G. (2022). Apa Itu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). <https://shorturl.asia/RXZLY>, diakses pada 7 Juni 2024 pukul 08.21
- Hamidah, Junaidi, dkk. 2023. Perpajakan. Kota Batam: Yayasan Cendika Mulia Mandiri.
- Kemenkeu. (2021) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) [Harmonisasi APBN dan APBD Optimalkan Manfaat Bagi Masyarakat - Media Keuangan \(kemenkeu.go.id\)](#) diakses tanggal 7 Juli 2024 pukul 10.25
- Kemenkeu. (2021). Pendapatan Asli Daerah [Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Apa saja jenis-jenis PAD? \(kemenkeu.go.id\)](#), diakses tanggal 7 Juli 2024 pukul 08.42.
- Kurniawan, Agung Wicaksono (2020). Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. [Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa \(ddtc.co.id\)](#), diakses pada 8 Juni 2024 pukul 09.31
- Law, O. F. (2024). Pengenalan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam UU HKPD. Law Office.
- Marcelino Wau, Alwinda Manao, Jhon Fiman Fau. 2023. Perpajakan. Jawa Barat: Salemba Empat.
- Mutia, A. C. (2024). Realisasi Pendapatan Negara Indonesia Berdasarkan Sumbernya Tahun 2022-2023. Databoks.
- Nida Uzakia. 2021. Mekanisme Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal. Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro: Semarang
- Okta Lisa. 2023. Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Fakultas Ekonomi Universitas Jambi: Jambi.
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Pembentukan

Organisasi Dinas-dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Jambi.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 Pasal 4 Tahun 2020 tentang Tahapan Penagihan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penagihan dengan Surat Paksa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Pasal 12 Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Dasar Hukum Penagihan Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelola Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Prihandani, U. G. (2022). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tanpa Membebani Masyarakat. <https://shorturl.asia/vAEMY>, diakses pada 8 juni 2024 pukul 11.23.

Puji, R. (2020). Perpajakan. Jakarta: Indomedia Pustaka.

Purwowidhu CS. (2023). Perkuat Reformasi, Capai Target Pajak. <https://shorturl.asia/92JSv>, diakses tanggal 8 Juni 2024 pukul 15.02.

Rani, M. (2018, September). Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-ciri, Jenis, dan Tarifnya. [Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya \(online-pajak.com\)](http://pajak.com), diakses tanggal 8 Juni 2024 pukul 21.08.

Ruang, M. (2024). Kenali Pajak Daerah: Pengertian, Jenis dan Tarifnya. [Kenali Pajak Daerah : Pengertian, Jenis dan Tarifnya \(ruangmenyala.com\)](https://ruangmenyala.com), diakses tanggal 7 Juni 2024 pukul 10.23.

Undang-undang No. 1 Tahun 2022 yang Mengatur Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 yang Mengatur Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan dengan Surat Paksa.

Undang-undang No. 23 Pasal 1 Ayat 12 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yang Mengatur Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 28 Tahun 2008 yang Mengatur Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yang Mengatur Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang Mengatur Tentang Pajak Daerah.

Undang-undang No.3 Tahun 2024 yang Mengatur Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.